

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-7/PB/2024

TENTANG

PENETAPAN ZONA TARIF LAYANAN
BALAI BESAR DAN BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan zona pada badan layanan umum dalam rangka pelaksanaan tarif layanan secara kolektif dalam satu kementerian negara/lembaga dengan karakteristik layanan yang sama diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian, penetapan zonasi badan layanan umum Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian dalam rangka penetapan tarif layanan berdasarkan zonasi ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PENETAPAN ZONA TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR DAN BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Indeks Tarif Layanan BLU yang selanjutnya disebut Indeks Tarif adalah nilai indeks yang mengukur kewajaran tarif berdasarkan pada tingkat biaya produksi dan keberpihakan sesuai tingkat kesejahteraan masing-masing daerah yang disusun dengan menggunakan variabel indeks kemahalan konstruksi, indeks pembangunan manusia, tingkat inflasi, dan/atau variabel lain yang diperlukan yang dapat merepresentasikan biaya produksi dan tingkat kesejahteraan.
3. Zonasi Tarif Layanan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut Zonasi BLU adalah pengklasifikasian Badan Layanan Umum ke dalam kelompok zona yang sesuai dengan nilai indeks tarif.
4. Zonasi Pengguna Layanan Tarif Layanan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut Zonasi Pengguna Layanan BLU adalah pengklasifikasian Pengguna Layanan BLU ke dalam kelompok zona yang sesuai dengan nilai indeks tarif lokasi pengguna layanan BLU berdasarkan kedudukannya yang menggunakan indeks tarif.

5. Tim Penilai Tarif Layanan BLU yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penilaian atas usulan tarif BLU.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur penetapan zona tarif layanan BLU Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian yang telah melalui proses penetapan tarif layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pengelolaan BLU.

BAB III PEMBENTUKAN ZONASI BLU DAN ZONASI PENGGUNA LAYANAN BLU

Pasal 3

- (1) Zonasi BLU dan Zonasi Pengguna Layanan BLU dibentuk dari Indeks Tarif.
- (2) Indeks Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dari variabel indeks kemahalan provinsi/kota/kabupaten, variabel indeks pembangunan manusia provinsi/kota/kabupaten, dan variabel tingkat inflasi provinsi/kota/kabupaten.
- (3) Indeks kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai ukuran tingkat biaya yang merepresentasikan kebutuhan biaya BLU dalam menjaga aspek kontinuitas dan pengembangan layanan serta aspek kompetisi yang sehat.
- (4) Indeks pembangunan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai faktor penyesuai tarif dari aspek tingkat kesejahteraan yaitu umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita yang merepresentasikan aspek daya beli masyarakat serta aspek keadilan dan kepatutan.
- (5) Tingkat inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai faktor penyesuai tarif dari aspek waktu untuk menggambarkan tarif yang paling mendekati kondisi perekonomian terkini.

Pasal 4

- (1) Zonasi BLU dan Zonasi Pengguna Layanan BLU dibentuk dari Indeks Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikelompokkan dalam 3 (tiga) zona yaitu zona I, zona II, dan zona III.

- (2) Zonasi BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Zona I untuk Indeks Tarif kurang dari 90;
 - b. Zona II untuk Indeks Tarif 90 sampai dengan 110; dan
 - c. Zona III untuk Indeks Tarif lebih dari 110.
- (3) Zonasi Pengguna Layanan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Zona I untuk Indeks Tarif kurang dari 90;
 - b. Zona II untuk Indeks Tarif 90 sampai dengan 110; dan
 - c. Zona III untuk Indeks Tarif lebih dari 110.
- (4) Dalam hal Badan Layanan Umum Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian telah ditetapkan dalam pembagian Zonasi BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemimpin BLU menetapkan tarif layanan spesifik untuk pengenaan tarif layanan kepada pengguna layanan mengacu pada nilai interval tarif sesuai zona dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian.

BAB IV

PENETAPAN ZONASI BLU

Pasal 5

- (1) Penetapan Zonasi BLU Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Penetapan Zonasi Pengguna Layanan BLU Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 6

- (1) Penetapan Zonasi BLU sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil penilaian/rekomendasi dari Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai melakukan penilaian dengan cara:
 - a. Mereviu Indeks Tarif; dan
 - b. Mengelompokkan ke dalam Zonasi BLU.
- (3) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Penilai menetapkan hasil penilaian/ rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk berita acara.

Pasal 7

Tim Penilai dapat melakukan pengelompokan Zonasi BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dalam hal:

- a. Didukung dengan analisa yang memadai terhadap aspek kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, keadilan dan kepatutan, dan/atau kompetisi yang sehat; atau
- b. Terdapat pertimbangan yang memadai atas usulan penetapan Zonasi BLU dari Menteri Perindustrian bagi Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian yang baru mendapatkan status BLU.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Pengguna Layanan BLU berada berada di zona yang berbeda dengan zonasi BLU, Pemimpin BLU dapat menetapkan besaran tarif mengacu pada Lampiran II sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2).
- (2) Dalam hal terdapat kota/kabupaten yang tidak tercantum dalam Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan zona yang berlaku pada kota/kabupaten yang terdekat dan/atau tingkat kesejahteraan yang setara.

BAB V

EVALUASI ATAS ZONASI BLU

Pasal 9

- (1) Penetapan Zonasi BLU Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dievaluasi secara periodik setiap tahun oleh Tim Penilai.
- (2) Evaluasi penetapan Zonasi BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan usulan perubahan Tarif Layanan BLU yang disampaikan oleh Menteri Perindustrian.
- (3) Evaluasi penetapan Zonasi BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman pembinaan pengelolaan keuangan BLU.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai pertimbangan perubahan Zonasi BLU Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian.
- (5) Penetapan perubahan Zonasi BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur melalui perubahan pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 7 Mei 2024

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN



Ditandatangani secara elektronik
ASTERA PRIMANTO BHAKTI

LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-7/PB/2024

TENTANG PENETAPAN ZONA TARIF LAYANAN BADAN
LAYANAN UMUM BALAI BESAR DAN BALAI STANDARDISASI
DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PADA KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN

**PENETAPAN ZONA TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
BALAI BESAR DAN BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
INDUSTRI PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

1. Zona I terdiri dari:
Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bandar Lampung.
2. Zona II terdiri dari:
 - a. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro;
 - b. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam dan Maritim;
 - c. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri; dan
 - d. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya.
3. Zona III terdiri dari:
 - a. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik;
 - b. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi dan Kemasan;
 - c. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Jakarta; dan
 - d. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda.

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Ditandatangani secara elektronik
ASTERA PRIMANTO BHAKTI



LAMPIRAN II
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
 NOMOR PER-7/PB/2024
 TENTANG PENETAPAN ZONA TARIF LAYANAN BADAN
 LAYANAN UMUM BALAI BESAR DAN BALAI STANDARDISASI
 DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PADA KEMENTERIAN
 PERINDUSTRIAN

**PENETAPAN ZONASI PENGGUNA LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
 BALAI BESAR DAN BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
 INDUSTRI PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

1. Zona I terdiri dari Pengguna Layanan yang berkedudukan di:

Kota/Kabupaten	Provinsi
1. Kabupaten Simeulue	Aceh
2. Kabupaten Aceh Singkil	Aceh
3. Kabupaten Aceh Selatan	Aceh
4. Kabupaten Aceh Tenggara	Aceh
5. Kabupaten Aceh Timur	Aceh
6. Kabupaten Aceh Barat	Aceh
7. Kabupaten Pidie	Aceh
8. Kabupaten Aceh Barat	Aceh
9. Kabupaten Gayo Lues	Aceh
10. Kabupaten Aceh Tamiang	Aceh
11. Kabupaten Aceh Jaya	Aceh
12. Kota Subulussalam	Aceh
13. Kabupaten Nias	Sumatera Utara
14. Kabupaten Mandailing Natal	Sumatera Utara
15. Kabupaten Nias Selatan	Sumatera Utara
16. Kabupaten Pakpak Bharat	Sumatera Utara
17. Kabupaten Batu Bara	Sumatera Utara
18. Kabupaten Padang Lawas	Sumatera Utara
19. Kabupaten Nias Utara	Sumatera Utara
20. Kabupaten Nias Barat	Sumatera Utara
21. Kabupaten Pesisir Selatan	Sumatera Barat
22. Kabupaten Solok	Sumatera Barat
23. Kabupaten Sijunjung	Sumatera Barat
24. Kabupaten Padang Pariaman	Sumatera Barat
25. Kabupaten Lima Puluh	Sumatera Barat
26. Kabupaten Pasaman	Sumatera Barat
27. Kabupaten Solok Selatan	Sumatera Barat
28. Kabupaten Pasaman Barat	Sumatera Barat
29. Kota Solok	Sumatera Barat
30. Kabupaten Kuantan Singingi	Riau
31. Kabupaten Indragiri Hilir	Riau
32. Kabupaten Rokan Hulu	Riau
33. Kabupaten Kepulauan Meranti	Riau
34. Kabupaten Merangin	Jambi
35. Kabupaten Sarolangun	Jambi

Kota/Kabupaten	Provinsi
36. Kabupaten Batang Hari	Jambi
37. Kabupaten Muaro Jambi	Jambi
38. Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Jambi
39. Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Jambi
40. Kabupaten Tebo	Jambi
41. Kabupaten Bungo	Jambi
42. Kota Jambi	Jambi
43. Kabupaten Ogan Komering Ulu	Sumatera Selatan
44. Kabupaten Ogan Komering Ilir	Sumatera Selatan
45. Kabupaten Muara Enim	Sumatera Selatan
46. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	Sumatera Selatan
47. Kabupaten Lahat	Sumatera Selatan
48. Kabupaten Musi Rawas	Sumatera Selatan
49. Kabupaten Musi Banyuasin	Sumatera Selatan
50. Kabupaten Banyu Asin	Sumatera Selatan
51. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Sumatera Selatan
52. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	Sumatera Selatan
53. Kabupaten Ogan Ilir	Sumatera Selatan
54. Kabupaten Empat Lawang	Sumatera Selatan
55. Kabupaten Musi Rawas Utara	Sumatera Selatan
56. Kota Pagar Alam	Sumatera Selatan
57. Kabupaten Bengkulu Selatan	Bengkulu
58. Kabupaten Rejang Lebong	Bengkulu
59. Kabupaten Bengkulu Utara	Bengkulu
60. Kabupaten Kaur	Bengkulu
61. Kabupaten Seluma	Bengkulu
62. Kabupaten Mukomuko	Bengkulu
63. Kabupaten Lebong	Bengkulu
64. Kabupaten Kepahiang	Bengkulu
65. Kabupaten Bengkulu Tengah	Bengkulu
66. Kota Bengkulu	Bengkulu
67. Kabupaten Lampung Barat	Lampung
68. Kabupaten Tanggamus	Lampung
69. Kabupaten Lampung Selatan	Lampung
70. Kabupaten Lampung Timur	Lampung
71. Kabupaten Lampung Tengah	Lampung
72. Kabupaten Lampung Utara	Lampung
73. Kabupaten Way Kanan	Lampung
74. Kabupaten Tulang Bawang	Lampung
75. Kabupaten Pesawaran	Lampung
76. Kabupaten Pringsewu	Lampung
77. Kabupaten Mesuji	Lampung
78. Kabupaten Tulang Bawang Barat	Lampung
79. Kabupaten Pesisir Barat	Lampung
80. Kabupaten Bangka Selatan	Bangka Belitung
81. Kabupaten Sukabumi	Jawa Barat
82. Kabupaten Cianjur	Jawa Barat

Kota/Kabupaten	Provinsi
83. Kabupaten Garut	Jawa Barat
84. Kabupaten Tasikmalaya	Jawa Barat
85. Kabupaten Kuningan	Jawa Barat
86. Kabupaten Majalengka	Jawa Barat
87. Kabupaten Pangandaran	Jawa Barat
88. Kota Sukabumi	Jawa Barat
89. Kota Tasikmalaya	Jawa Barat
90. Kabupaten Purbalingga	Jawa Tengah
91. Kabupaten Banjarnegara	Jawa Tengah
92. Kabupaten Kebumen	Jawa Tengah
93. Kabupaten Wonosobo	Jawa Tengah
94. Kabupaten Magelang	Jawa Tengah
95. Kabupaten Wonogiri	Jawa Tengah
96. Kabupaten Batang	Jawa Tengah
97. Kabupaten Pemalang	Jawa Tengah
98. Kabupaten Tegal	Jawa Tengah
99. Kabupaten Brebes	Jawa Tengah
100. Kota Magelang	Jawa Tengah
101. Kota Tegal	Jawa Tengah
102. Kabupaten Pacitan	Jawa Timur
103. Kabupaten Trenggalek	Jawa Timur
104. Kabupaten Blitar	Jawa Timur
105. Kabupaten Lumajang	Jawa Timur
106. Kabupaten Jember	Jawa Timur
107. Kabupaten Bondowoso	Jawa Timur
108. Kabupaten Situbondo	Jawa Timur
109. Kabupaten Probolinggo	Jawa Timur
110. Kabupaten Pasuruan	Jawa Timur
111. Kabupaten Ngawi	Jawa Timur
112. Kabupaten Tuban	Jawa Timur
113. Kabupaten Bangkalan	Jawa Timur
114. Kabupaten Sampang	Jawa Timur
115. Kabupaten Pamekasan	Jawa Timur
116. Kabupaten Sumenep	Jawa Timur
117. Kota Blitar	Jawa Timur
118. Kota Probolinggo	Jawa Timur
119. Kota Pasuruan	Jawa Timur
120. Kabupaten Pandeglang	Banten
121. Kabupaten Lebak	Banten
122. Kabupaten Serang	Banten
123. Kota Serang	Banten
124. Kabupaten Karangasem	Bali
125. Kabupaten Lombok Barat	Nusa Tenggara Barat
126. Kabupaten Lombok Tengah	Nusa Tenggara Barat
127. Kabupaten Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat
128. Kabupaten Sumbawa	Nusa Tenggara Barat
129. Kabupaten Lombok Utara	Nusa Tenggara Barat

Kota/Kabupaten	Provinsi
130. Kabupaten Sumba Barat	Nusa Tenggara Timur
131. Kabupaten Sumba Timur	Nusa Tenggara Timur
132. Kabupaten Kupang	Nusa Tenggara Timur
133. Kabupaten Timor Tengah Selatan	Nusa Tenggara Timur
134. Kabupaten Timor Tengah Utara	Nusa Tenggara Timur
135. Kabupaten Belu	Nusa Tenggara Timur
136. Kabupaten Alor	Nusa Tenggara Timur
137. Kabupaten Lembata	Nusa Tenggara Timur
138. Kabupaten Flores Timur	Nusa Tenggara Timur
139. Kabupaten Sikka	Nusa Tenggara Timur
140. Kabupaten Ende	Nusa Tenggara Timur
141. Kabupaten Ngada	Nusa Tenggara Timur
142. Kabupaten Manggarai	Nusa Tenggara Timur
143. Kabupaten Rote Ndao	Nusa Tenggara Timur
144. Kabupaten Manggarai Barat	Nusa Tenggara Timur
145. Kabupaten Sumba Tengah	Nusa Tenggara Timur
146. Kabupaten Sumba Barat Daya	Nusa Tenggara Timur
147. Kabupaten Nagekeo	Nusa Tenggara Timur
148. Kabupaten Manggarai Timur	Nusa Tenggara Timur
149. Kabupaten Sabu Raijua	Nusa Tenggara Timur
150. Kabupaten Malaka	Nusa Tenggara Timur
151. Kota Kupang	Nusa Tenggara Timur
152. Kabupaten Mempawah	Kalimantan Barat
153. Kabupaten Ketapang	Kalimantan Barat
154. Kabupaten Kapuas Hulu	Kalimantan Barat
155. Kabupaten Sekadau	Kalimantan Barat
156. Kabupaten Melawi	Kalimantan Barat
157. Kabupaten Kayong Utara	Kalimantan Barat
158. Kabupaten Kubu Raya	Kalimantan Barat
159. Kabupaten Katingan	Kalimantan Tengah
160. Kabupaten Pulang Pisau	Kalimantan Tengah
161. Kabupaten Kota Baru	Kalimantan Selatan
162. Kabupaten Barito Kuala	Kalimantan Selatan
163. Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Kalimantan Selatan
164. Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Kalimantan Selatan
165. Kabupaten Hulu Sungai Utara	Kalimantan Selatan
166. Kabupaten Tana Tidung	Kalimantan Utara
167. Kabupaten Bolaang Mongondow	Sulawesi Utara
168. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	Sulawesi Utara
169. Kabupaten Minahasa Tenggara	Sulawesi Utara
170. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Sulawesi Utara
171. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Sulawesi Utara
172. Kabupaten Banggai Kepulauan	Sulawesi Tengah
173. Kabupaten Banggai	Sulawesi Tengah
174. Kabupaten Poso	Sulawesi Tengah
175. Kabupaten Donggala	Sulawesi Tengah
176. Kabupaten Toli-Toli	Sulawesi Tengah

Kota/Kabupaten	Provinsi
177. Kabupaten Buol	Sulawesi Tengah
178. Kabupaten Parigi Moutong	Sulawesi Tengah
179. Kabupaten Tojo Una-Una	Sulawesi Tengah
180. Kabupaten Sigi	Sulawesi Tengah
181. Kabupaten Banggai Laut	Sulawesi Tengah
182. Kabupaten Morowali Utara	Sulawesi Tengah
183. Kabupaten Selayar	Sulawesi Selatan
184. Kabupaten Bulukumba	Sulawesi Selatan
185. Kabupaten Bantaeng	Sulawesi Selatan
186. Kabupaten Jeneponto	Sulawesi Selatan
187. Kabupaten Takalar	Sulawesi Selatan
188. Kabupaten Gowa	Sulawesi Selatan
189. Kabupaten Sinjai	Sulawesi Selatan
190. Kabupaten Maros	Sulawesi Selatan
191. Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan	Sulawesi Selatan
192. Kabupaten Barru	Sulawesi Selatan
193. Kabupaten Bone	Sulawesi Selatan
194. Kabupaten Soppeng	Sulawesi Selatan
195. Kabupaten Wajo	Sulawesi Selatan
196. Kabupaten Sidenreng Rappang	Sulawesi Selatan
197. Kabupaten Pinrang	Sulawesi Selatan
198. Kabupaten Luwu	Sulawesi Selatan
199. Kabupaten Buton	Sulawesi Tenggara
200. Kabupaten Muna	Sulawesi Tenggara
201. Kabupaten Konawe	Sulawesi Tenggara
202. Kabupaten Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara
203. Kabupaten Bombana	Sulawesi Tenggara
204. Kabupaten Kolaka Utara	Sulawesi Tenggara
205. Kabupaten Konawe Utara	Sulawesi Tenggara
206. Kabupaten Kolaka Timur	Sulawesi Tenggara
207. Kabupaten Konawe Kepulauan	Sulawesi Tenggara
208. Kabupaten Muna Barat	Sulawesi Tenggara
209. Kabupaten Buton Tengah	Sulawesi Tenggara
210. Kabupaten Buton Selatan	Sulawesi Tenggara
211. Kabupaten Boalemo	Gorontalo
212. Kabupaten Gorontalo	Gorontalo
213. Kabupaten Pohuwato	Gorontalo
214. Kabupaten Bone Bolango	Gorontalo
215. Kabupaten Gorontalo Utara	Gorontalo
216. Kota Gorontalo	Gorontalo
217. Kabupaten Majene	Sulawesi Barat
218. Kabupaten Polewali Mandar	Sulawesi Barat
219. Kabupaten Mamasa	Sulawesi Barat
220. Kabupaten Mamuju	Sulawesi Barat
221. Kabupaten Pasangkayu	Sulawesi Barat
222. Kabupaten Mamuju Tengah	Sulawesi Barat
223. Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Maluku

Kota/Kabupaten	Provinsi
224. Kabupaten Kepulauan Aru	Maluku
225. Kabupaten Seram Bagian Barat	Maluku
226. Kabupaten Seram Bagian Timur	Maluku
227. Kabupaten Maluku Barat Daya	Maluku
228. Kabupaten Buru Selatan	Maluku
229. Kabupaten Halmahera Barat	Maluku Utara
230. Kabupaten Halmahera Tengah	Maluku Utara
231. Kabupaten Kepulauan Sula	Maluku Utara
232. Kabupaten Halmahera Selatan	Maluku Utara
233. Kabupaten Halmahera Utara	Maluku Utara
234. Kabupaten Halmahera Timur	Maluku Utara
235. Kabupaten Pulau Morotai	Maluku Utara
236. Kabupaten Pulau Taliabu	Maluku Utara
237. Kabupaten Kaimana	Papua Barat
238. Kabupaten Teluk Wondama	Papua Barat
239. Kabupaten Sorong Selatan	Papua Barat
240. Kabupaten Sorong	Papua Barat
241. Kabupaten Tambrau	Papua Barat
242. Kabupaten Maybrat	Papua Barat
243. Kabupaten Asmat	Papua

2. Zona II terdiri dari Pengguna Layanan yang berkedudukan di:

Kota/Kabupaten	Provinsi
1. Kabupaten Aceh Tengah	Aceh
2. Kabupaten Aceh Besar	Aceh
3. Kabupaten Bireuen	Aceh
4. Kabupaten Aceh Utara	Aceh
5. Kabupaten Nagan Raya	Aceh
6. Kabupaten Bener Meriah	Aceh
7. Kabupaten Pidie Jaya	Aceh
8. Kota Langsa	Aceh
9. Kabupaten Tapanuli Selatan	Sumatera Utara
10. Kabupaten Tapanuli Tengah	Sumatera Utara
11. Kabupaten Tapanuli Utara	Sumatera Utara
12. Kabupaten Toba	Sumatera Utara
13. Kabupaten Labuhan Batu	Sumatera Utara
14. Kabupaten Asahan	Sumatera Utara
15. Kabupaten Simalungun	Sumatera Utara
16. Kabupaten Dairi	Sumatera Utara
17. Kabupaten Karo	Sumatera Utara
18. Kabupaten Deli Serdang	Sumatera Utara
19. Kabupaten Langkat	Sumatera Utara
20. Kabupaten Humbang Hasundutan	Sumatera Utara
21. Kabupaten Samosir	Sumatera Utara
22. Kabupaten Serdang Bedagai	Sumatera Utara
23. Kabupaten Padang Lawas Utara	Sumatera Utara
24. Kabupaten Labuhan Batu Selatan	Sumatera Utara

Kota/Kabupaten	Provinsi
25. Kabupaten Labuhan Batu Utara	Sumatera Utara
26. Kota Tanjung Balai	Sumatera Utara
27. Kota Pematang Siantar	Sumatera Utara
28. Kota Tebing Tinggi	Sumatera Utara
29. Kota Binjai	Sumatera Utara
30. Kota Padangsidimpuan	Sumatera Utara
31. Kota Gunungsitoli	Sumatera Utara
32. Kabupaten Kepulauan Mentawai	Sumatera Barat
33. Kabupaten Tanah Datar	Sumatera Barat
34. Kabupaten Agam	Sumatera Barat
35. Kabupaten Dharmasraya	Sumatera Barat
36. Kota Padang	Sumatera Barat
37. Kota Sawah Lunto	Sumatera Barat
38. Kota Padang Panjang	Sumatera Barat
39. Kota Bukittinggi	Sumatera Barat
40. Kota Payakumbuh	Sumatera Barat
41. Kota Pariaman	Sumatera Barat
42. Kabupaten Indragiri Hulu	Riau
43. Kabupaten Pelalawan	Riau
44. Kabupaten Siak	Riau
45. Kabupaten Kampar	Riau
46. Kabupaten Bengkalis	Riau
47. Kabupaten Rokan Hilir	Riau
48. Kota Pekanbaru	Riau
49. Kota Dumai	Riau
50. Kabupaten Kerinci	Jambi
51. Kota Sungai Penuh	Jambi
52. Kota Lubuklinggau	Sumatera Selatan
53. Kota Palembang	Sumatera Selatan
54. Kota Prabumulih	Sumatera Selatan
55. Kota Bandar Lampung	Lampung
56. Kota Metro	Lampung
57. Kabupaten Bangka	Bangka Belitung
58. Kabupaten Belitung	Bangka Belitung
59. Kabupaten Bangka Barat	Bangka Belitung
60. Kabupaten Bangka Tengah	Bangka Belitung
61. Kabupaten Belitung Timur	Bangka Belitung
62. Kota Pangkal Pinang	Bangka Belitung
63. Kabupaten Karimun	Kepulauan Riau
64. Kabupaten Bintan	Kepulauan Riau
65. Kabupaten Lingga	Kepulauan Riau
66. Kabupaten Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau
67. Kabupaten Bogor	Jawa Barat
68. Kabupaten Ciamis	Jawa Barat
69. Kabupaten Cirebon	Jawa Barat
70. Kabupaten Sumedang	Jawa Barat
71. Kabupaten Indramayu	Jawa Barat

Kota/Kabupaten	Provinsi
72. Kabupaten Subang	Jawa Barat
73. Kabupaten Purwakarta	Jawa Barat
74. Kabupaten Karawang	Jawa Barat
75. Kabupaten Bekasi	Jawa Barat
76. Kabupaten Bandung Barat	Jawa Barat
77. Kota Bogor	Jawa Barat
78. Kota Cirebon	Jawa Barat
79. Kota Bekasi	Jawa Barat
80. Kota Banjar	Jawa Barat
81. Kabupaten Cilacap	Jawa Tengah
82. Kabupaten Banyumas	Jawa Tengah
83. Kabupaten Purworejo	Jawa Tengah
84. Kabupaten Boyolali	Jawa Tengah
85. Kabupaten Klaten	Jawa Tengah
86. Kabupaten Sukoharjo	Jawa Tengah
87. Kabupaten Karanganyar	Jawa Tengah
88. Kabupaten Sragen	Jawa Tengah
89. Kabupaten Grobogan	Jawa Tengah
90. Kabupaten Blora	Jawa Tengah
91. Kabupaten Rembang	Jawa Tengah
92. Kabupaten Pati	Jawa Tengah
93. Kabupaten Kudus	Jawa Tengah
94. Kabupaten Jepara	Jawa Tengah
95. Kabupaten Demak	Jawa Tengah
96. Kabupaten Semarang	Jawa Tengah
97. Kabupaten Temanggung	Jawa Tengah
98. Kabupaten Kendal	Jawa Tengah
99. Kabupaten Pekalongan	Jawa Tengah
100. Kota Semarang	Jawa Tengah
101. Kota Pekalongan	Jawa Tengah
102. Kabupaten Kulon Progo	DI Yogyakarta
103. Kabupaten Gunung Kidul	DI Yogyakarta
104. Kabupaten Ponorogo	Jawa Timur
105. Kabupaten Tulungagung	Jawa Timur
106. Kabupaten Kediri	Jawa Timur
107. Kabupaten Malang	Jawa Timur
108. Kabupaten Banyuwangi	Jawa Timur
109. Kabupaten Mojokerto	Jawa Timur
110. Kabupaten Jombang	Jawa Timur
111. Kabupaten Nganjuk	Jawa Timur
112. Kabupaten Madiun	Jawa Timur
113. Kabupaten Magetan	Jawa Timur
114. Kabupaten Bojonegoro	Jawa Timur
115. Kabupaten Lamongan	Jawa Timur
116. Kota Kediri	Jawa Timur
117. Kota Malang	Jawa Timur
118. Kota Mojokerto	Jawa Timur

Kota/Kabupaten	Provinsi
119. Kota Madiun	Jawa Timur
120. Kota Batu	Jawa Timur
121. Kabupaten Tangerang	Banten
122. Kota Tangerang	Banten
123. Kota Cilegon	Banten
124. Kabupaten Jembrana	Bali
125. Kabupaten Tabanan	Bali
126. Kabupaten Gianyar	Bali
127. Kabupaten Klungkung	Bali
128. Kabupaten Bangli	Bali
129. Kabupaten Buleleng	Bali
130. Kabupaten Dompu	Nusa Tenggara Barat
131. Kabupaten Bima	Nusa Tenggara Barat
132. Kabupaten Sumbawa Barat	Nusa Tenggara Barat
133. Kota Bima	Nusa Tenggara Barat
134. Kabupaten Sambas	Kalimantan Barat
135. Kabupaten Bengkayang	Kalimantan Barat
136. Kabupaten Landak	Kalimantan Barat
137. Kabupaten Sanggau	Kalimantan Barat
138. Kabupaten Sintang	Kalimantan Barat
139. Kota Singkawang	Kalimantan Barat
140. Kabupaten Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah
141. Kabupaten Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah
142. Kabupaten Kapuas	Kalimantan Tengah
143. Kabupaten Barito Selatan	Kalimantan Tengah
144. Kabupaten Barito Utara	Kalimantan Tengah
145. Kabupaten Sukamara	Kalimantan Tengah
146. Kabupaten Lamandau	Kalimantan Tengah
147. Kabupaten Seruyan	Kalimantan Tengah
148. Kabupaten Gunung Mas	Kalimantan Tengah
149. Kabupaten Barito Timur	Kalimantan Tengah
150. Kabupaten Murung Raya	Kalimantan Tengah
151. Kota Palangka Raya	Kalimantan Tengah
152. Kabupaten Tanah Laut	Kalimantan Selatan
153. Kabupaten Banjar	Kalimantan Selatan
154. Kabupaten Tapin	Kalimantan Selatan
155. Kabupaten Tabalong	Kalimantan Selatan
156. Kabupaten Tanah Bumbu	Kalimantan Selatan
157. Kabupaten Balangan	Kalimantan Selatan
158. Kota Banjar Baru	Kalimantan Selatan
159. Kabupaten Paser	Kalimantan Timur
160. Kabupaten Penajam Paser Utara	Kalimantan Timur
161. Kabupaten Malinau	Kalimantan Utara
162. Kabupaten Bulungan	Kalimantan Utara
163. Kabupaten Nunukan	Kalimantan Utara
164. Kabupaten Minahasa	Sulawesi Utara
165. Kabupaten Kepulauan Sangihe	Sulawesi Utara

Kota/Kabupaten	Provinsi
166. Kabupaten Minahasa Selatan	Sulawesi Utara
167. Kabupaten Siau Tagolandang Biaro	Sulawesi Utara
168. Kota Bitung	Sulawesi Utara
169. Kota Tomohon	Sulawesi Utara
170. Kota Kotamobagu	Sulawesi Utara
171. Kabupaten Morowali	Sulawesi Tengah
172. Kota Palu	Sulawesi Tengah
173. Kabupaten Enrekang	Sulawesi Selatan
174. Kabupaten Tana Toraja	Sulawesi Selatan
175. Kabupaten Luwu Utara	Sulawesi Selatan
176. Kabupaten Luwu Timur	Sulawesi Selatan
177. Kabupaten Toraja Utara	Sulawesi Selatan
178. Kota Parepare	Sulawesi Selatan
179. Kota Palopo	Sulawesi Selatan
180. Kabupaten Kolaka	Sulawesi Tenggara
181. Kabupaten Wakatobi	Sulawesi Tenggara
182. Kabupaten Buton Utara	Sulawesi Tenggara
183. Kota Kendari	Sulawesi Tenggara
184. Kota Bau-Bau	Sulawesi Tenggara
185. Kabupaten Maluku Tenggara	Maluku
186. Kabupaten Maluku Tengah	Maluku
187. Kabupaten Buru	Maluku
188. Kota Tual	Maluku
189. Kota Tidore Kepulauan	Maluku Utara
190. Kabupaten Fakfak	Papua Barat
191. Kabupaten Teluk Bintuni	Papua Barat
192. Kabupaten Manokwari	Papua Barat
193. Kabupaten Raja Ampat	Papua Barat
194. Kabupaten Manokwari Selatan	Papua Barat
195. Kabupaten Pegunungan Arfak	Papua Barat
196. Kota Sorong	Papua Barat
197. Kabupaten Kepulauan Yapen	Papua
198. Kabupaten Boven Digoel	Papua
199. Kabupaten Mappi	Papua
200. Kabupaten Yahukimo	Papua
201. Kabupaten Sarmi	Papua
202. Kabupaten Waropen	Papua
203. Kabupaten Supiori	Papua
204. Kabupaten Memberamo Raya	Papua
205. Kabupaten Nduga	Papua

3. Zona III terdiri dari Pengguna Layanan yang berkedudukan di:

Kota/Kabupaten	Provinsi
1. Kota Banda Aceh	Aceh
2. Kota Sabang	Aceh
3. Kota Lhokseumawe	Aceh
4. Kota Sibolga	Sumatera Utara

Kota/Kabupaten	Provinsi
5. Kota Medan	Sumatera Utara
6. Kabupaten Natuna	Kepulauan Riau
7. Kota Batam	Kepulauan Riau
8. Kota Tanjung Pinang	Kepulauan Riau
9. Kabupaten Kepulauan Seribu	DKI Jakarta
10. Kota Jakarta Selatan	DKI Jakarta
11. Kota Jakarta Timur	DKI Jakarta
12. Kota Jakarta Pusat	DKI Jakarta
13. Kota Jakarta Barat	DKI Jakarta
14. Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta
15. Kabupaten Bandung	Jawa Barat
16. Kota Bandung	Jawa Barat
17. Kota Depok	Jawa Barat
18. Kota Cimahi	Jawa Barat
19. Kota Surakarta	Jawa Tengah
20. Kota Salatiga	Jawa Tengah
21. Kabupaten Bantul	DI Yogyakarta
22. Kabupaten Sleman	DI Yogyakarta
23. Kota Yogyakarta	DI Yogyakarta
24. Kabupaten Sidoarjo	Jawa Timur
25. Kabupaten Gresik	Jawa Timur
26. Kota Surabaya	Jawa Timur
27. Kota Tangerang Selatan	Banten
28. Kabupaten Badung	Bali
29. Kota Denpasar	Bali
30. Kota Mataram	Nusa Tenggara Barat
31. Kota Pontianak	Kalimantan Barat
32. Kota Banjarmasin	Kalimantan Selatan
33. Kabupaten Kutai Barat	Kalimantan Timur
34. Kabupaten Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur
35. Kabupaten Kutai Timur	Kalimantan Timur
36. Kabupaten Berau	Kalimantan Timur
37. Kabupaten Mahakam Hulu	Kalimantan Timur
38. Kota Balikpapan	Kalimantan Timur
39. Kota Samarinda	Kalimantan Timur
40. Kota Bontang	Kalimantan Timur
41. Kota Tarakan	Kalimantan Utara
42. Kabupaten Kepulauan Talaud	Sulawesi Utara
43. Kabupaten Minahasa Utara	Sulawesi Utara
44. Kota Manado	Sulawesi Utara
45. Kota Makassar	Sulawesi Selatan
46. Kota Ambon	Maluku
47. Kota Ternate	Maluku Utara
48. Kabupaten Merauke	Papua
49. Kabupaten Jayawijaya	Papua
50. Kabupaten Jayapura	Papua
51. Kabupaten Nabire	Papua

Kota/Kabupaten	Provinsi
52. Kabupaten Biak Numfor	Papua
53. Kabupaten Paniai	Papua
54. Kabupaten Puncak Jaya	Papua
55. Kabupaten Mimika	Papua
56. Kabupaten Pegunungan Bintang	Papua
57. Kabupaten Tolikara	Papua
58. Kabupaten Keerom	Papua
59. Kabupaten Lanny Jaya	Papua
60. Kabupaten Memberamo Tengah	Papua
61. Kabupaten Yalimo	Papua
62. Kabupaten Puncak	Papua
63. Kabupaten Dogiyai	Papua
64. Kabupaten Intan Jaya	Papua
65. Kabupaten Deiyai	Papua
66. Kota Jayapura	Papua

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Ditandatangani secara elektronik
ASTERA PRIMANTO BHAKTI